

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan pada tatanan kehidupan masyarakat baik yang dilakukan secara terarah dengan porsi sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah atau wilayah, pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dengan harapan dapat menciptakan suatu iklim ekonomi yang baik untuk masyarakat (Todaro M. P., Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh, 2000). Pembangunan berdasarkan pada tujuan tertentu, pembangunan ekonomi memiliki arah yang menuju pada kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga menciptakan perubahan yang bersifat multidimensional dan melibatkan seluruh aspek yang berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Menurut Todaro (1997), dalam konteks pembangunan ekonomi, proses yang dilakukan mencakup berbagai aspek-aspek kehidupan masyarakat, diantaranya aspek social, sikap masyarakat, institusi dan lain-lain. Pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah membangun system yang dapat berjalan dengan baik untuk menjadi jalan mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas.

Untuk melihat progress pembangunan diperlukan indikator jelas dalam melihatnya, pada dasarnya indikator harus dapat melihat secara padan perkembangan pembangunan Negara berkembang dan Negara maju. Ernita (2013) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digambarkan sebagai sebuah perkembangan ekonomi negara menuju kearah yang lebih baik secara terus menerus yang diukur berdasarkan periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi acuan utama dalam penggolongan Negara, yang terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: miskin, berkembang dan maju. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat melaksanakan strategi kebijakan yaitu dengan

pemberian otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah pusat dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dari daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam mengelola keuangan dan perencanaan serta memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam.

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya produktifitas industri atau kenaikan pendapatan perkapita (Sukirno, 2003). Besarnya pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu patokan dari keberhasilan proses perencanaan daerah. Perbedaan arah pembangunan dan kualitas pimpinan daerah menjadi faktor utama perbedaan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Selain itu, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) juga dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Jumlah pengeluaran pemerintah sangat bergantung pada pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah pada kurun waktu tertentu. Sumber pendapatan daerah pada era otonomi tidak lagi hanya terpacu pada dana dari pemerintah pusat, namun juga pengembangan PAD.

Upaya dalam melakukan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah ditentukan oleh pendanaan, dengan adanya UU kemandirian daerah, pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan PAD sebagai sumber permodalan dalam pembangunan daerah. PAD sebagai salah satu instrument pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan lain yang sah. PAD menjadi sumber modal bagi pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian. PAD yang tinggi maka akan meningkatkan anggaran dana pemerintah daerah dalam menjalankan perekonomian dan pemerintahan. Dengan adanya peningkatan PAD yang berarti juga meningkatkan pembangunan daerah sehingga akan mempengaruhi terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun kebijakan otonomi daerah sudah dijalankan sejak tahun 2004, pemerintah pusat hingga saat ini masih tetap memberikan transfer dana ke pemerintah daerah melalui DAK dan DAU. DAU komponen belanja dari APBN dan dialokasikan untuk daerah

sehingga menjadi salah satu pendapatan daerah non PAD. Dana alokasi umum penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu digunakan untuk pembangunan ruang sector publik, yang bertujuan untuk memberi dorongan kepada masyarakat untuk lebih produktif dan meningkatkan output. Selain itu, adanya perbaikan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah akan membuat investor tertarik kepada daerah sehingga hal tersebut akan menciptakan trend positif pertumbuhan ekonomi di daerah (Sidik, 2003). Artinya, semakin tinggi DAU yang diberikan pemerintah akan mendorong perbaikan fasilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktifitas ekonomi, yang pada tujuan akhirnya akan mengakibatkan terjadinya peningkatan perekonomian.

Transfer dana dari pemerintah pusat lainnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah bagian dari APBN yang dialokasikan untuk pemerintah daerah. Penggunaan DAK ditentukan oleh pemerintah pusat, peruntutan penggunaannya sejalan dengan prioritas pemerintah pusat. Tujuan alokasi DAK adalah untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat khususnya dibidang pendidikan, kesehatan, dan isu lainnya. Alokasi DAK menjadi kewenangan penuh pemerintah, pemerintah daerah hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan. Dalam jangka panjang alokasi DAK akan turut menyumbang kontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Sutedi, 2012). Besarnya dana alokasi umum yang diberikan diyakini mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, semakin besar dana yang diberikan maka juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dua faktor diatas menjadi variabel yang diindikasikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain faktor diatas masih terdapat satu variabel lain yang juga diindikasikan mempengaruhi perekonomian, variabel tersebut adalah belanja modal. Belanja modal yaitu biaya yang dilakukan untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana yang memiliki umur ekonomis satu tahun lebih dan digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan belanja modal tersebut diharapkan mampu mempermudah masyarakat maupun pemerintah

dalam peningkatan ekonomi masyarakat sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita (Arini S & Kusuma, 2019). Adanya perbaikan sarana dan prasana pada suatu daerah tersebut akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Tabel 1.1 Perkembangan PAD, DAU, DAK dan BM di Provinsi Bengkulu (2012-2020)

Tahun	PAD	DAU	DAK	BM
2012	168779207	3784050376	805842010	974927678
2013	225132241	4116297797	942332965	1261142157
2014	360417550	4574435994	1542003018	1524218102
2015	410491586	4800835996	2386821755	1881009991
2016	477906449	5201717817	2115112071	2218315473
2017	655667048	5123680766	1487730993	2185897053
2018	727740053	5090684251	1425537263	1409957241
2019	677083002	5314519083	1759975597	1714114500
2020	649097428	5067350469	1711709113	1535678261

Sumber: Badan Pusat Statistika (2020)

Pekembangan PAD, DAU, DAK dan belanja modal Provinsi Bengkulu dari tahun 2012-2020. Perkembangan varaibel diatas diharapkan turut serta mempengaruhi perkembangan perekonomian di Provinsi Bengkulu.

Secara geografis, letak provinsi ini berada di selatan barat pulau Sumatera. Dengan beragam potensi alam dan sumber daya lainnya, ini menjadi suatu kekuatan khusus, namun hingga saat ini masih menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, Bengkulu masuk kedalam salah satu provinsi termiskin di Sumatera. Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa perekonomian Bengkul fluktuatif di setiap tahunnya.

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Bengkulu (2012-2020)

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Laju PDRB (Persen)
2012	Rp32.363.038	6,83
2013	Rp34.326.372	6,07
2014	Rp36.207.146	5,48
2015	Rp38.066.006	5,13
2016	Rp40.076.544	5,28
2017	Rp42.073.516	4,98
2018	Rp44.164.110	4,97
2019	Rp46.345.454	4,94
2020	Rp46.338.436	-0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Variabel diatas menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Oleh sebab itu penelitian ini untuk melihat seberapa besar pengaruh faktor-faktor diatas terhadap pertumbuhan ekonomi pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2012-2020, kurun waktu tersebut digunakan karena terdapat perubahan tahun dasar PDRB harga konstan sejak tahun 2012-2020, penelitian ini mengambil judul “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu*”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan penelitian ini adalah pada ruang lingkup pengaruh DAK, DAU, PAD dan Belanja Modal (BM) terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Bengkulu dengan rentang waktu tahun 2012-2020.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh PAD pada pertumbuhan ekonomi di Bengkulu?
2. Apakah terdapat pengaruh DAU pada pertumbuhan ekonomi di Bengkulu?
3. Apakah terdapat pengaruh DAK pada pertumbuhan ekonomi di Bengkulu?

4. Apakah terdapat pengaruh Belanja Modal (BM) pada pertumbuhan ekonomi di Bengkulu?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.
3. Untuk mengetahui pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai studi literatur yang dapat menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan sebagai studi literatur penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi sebuah kajian ilmiah sebagai sumber informasi yang dapat digunakan menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan bagi pihak terkait.